

**LAPORAN TAHUNAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**JUDUL PENELITIAN**

**PEMBINAAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL  
BERBASIS PILAR-PILAR KEBANGSAAN DI MADRASAH ALIYAH  
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun**

**Ketua: Dr. Samsuri, M.Ag. NIDN. 0019067206  
Anggota: Dr. Marzuki, M.Ag. NIDN. 0021046607**

**Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian dalam  
rangka Pelaksanaan Program Penelitian Desentralisasi BOPTN Skim: Hibah  
Bersaing Tahun Anggaran 2014 Nomor: 233a/HB.-BOPTN/UN34.21/2014 Tanggal 17  
Maret 2014**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**OKTOBER 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

<b>Judul Kegiatan</b>	PEMBINAAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL BERBASIS PILAR-PILAR KEBANGSAAN DI MADRASAH ALIYAH SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
<b>Peneliti / Pelaksana</b>	
Nama Lengkap	Dr. SAMSURI M.Ag
NIDN	0019067206
Jabatan Fungsional	-
Program Studi	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Nomor HP	081805950338
Surel (e-mail)	samsuri@uny.ac.id
<b>Anggota Peneliti (1)</b>	
Nama Lengkap	Dr. MARZUKI M.Ag
NIDN	0021046607
Penguruan Tinggi	Universitas Negeri Yogyakarta
<b>Institusi Mitra (jika ada)</b>	
Nama Institusi Mitra	
Alamat	
Penanggung Jawab	
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun
<b>Biaya Tahun Berjalan</b>	Rp. 50.000.000,00
<b>Biaya Keseluruhan</b>	Rp. 138.000.000,00



Menyetujui  
Dekan FPE UNY

(Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.)  
NIP/NIK 196203211989031001

Yogyakarta, 28 - 10 - 2014,  
Ketua Peneliti,

(Dr. SAMSURI M.Ag.)  
NIP/NIK 197206192002121001



Menyetujui,  
Ketua LPPM UNY

(Prof. Dr. Anik Ghufroh)  
NIP/NIK 196211111988031001

## RINGKASAN

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, mengidentifikasi nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang dimuat dalam dokumen sosialisasi “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan” MPR RI yang relevan dengan kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan di Madrasah Aliyah. *Kedua*, tersusun model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan berdasar identifikasi kebutuhan di Madrasah Aliyah.

Penelitian dilakukan melalui (1) survei kebutuhan pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA; dan, (2) *focus group discussion* (FGD) bersama guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Aliyah Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengalaman dan kebutuhan praktis model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan di sekolah. Selain itu data penelitian mendasarkan diri kepada dokumentasi praktik pembinaan karakter kewargaan yang dikembangkan selama ini.

Temuan penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa MA belum seluruhnya melakukan pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia secara eksplisit dalam program kurikuler dan kultur sekolah dengan label pembinaan karakter kewargaan multikultur. Namun, dalam praktiknya seluruh MA baik secara eksplisit maupun implisit sudah melakukan upaya pembinaan karakter kewargaan multikultural dalam hal sikap menghormati (respek) dan mengakui (rekognisi) setiap perbedaan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *pendidikan kewarganegaraan, kewargaan multikultural, pilar kebangsaan, madrasah aliyah*

## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah swt, karena laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang dimuat dalam dokumen sosialisasi “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan” MPR RI yang relevan dengan kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan di Madrasah Aliyah, dan menyusun model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan berdasar identifikasi kebutuhan di Madrasah Aliyah.

Penelitian didanai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Desentralisasi BOPTN Skim: Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014 Nomor: 233a/HB.-BOPTN/UN34.21/2014 Tanggal 17 Maret 2014. Untuk ini, tim peneliti menghaturkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan penelitian yang diberikan.

Terimakasih secara khusus disampaikan kepada guru-guru anggota MGMP PKN MA DIY yang telah bersedia bekerjasama dalam kegiatan penelitian ini. Kepada mereka, hasil penelitian ini dipersembahkan.

Tim peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak. Untuk itu, semoga di penelitian berikutnya akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 Oktober 2014

Tim Peneliti,

Samsuri & Marzuki

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2.1 Masyarakat Kewargaan dan Kewargaan Multikultural .....	3
2.2 Pilar-pilar Kebangsaan Indonesia .....	6
2.3 Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan .....	7
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	10
3.1 Tujuan Penelitian .....	10
3.2 Manfaat Penelitian .....	10
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	11
4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
4.2 Desain Penelitian .....	11
4.3 Sumber Data dan Subjek Penelitian .....	11
4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....	12
4.5 Luaran dan Indikator .....	13

BAB 5	HASIL YANG DICAPAI.....	14
	5.1 Identifikasi Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah .....	14
	5.2 Model Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah .....	17
	5.3 Kendala Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah .....	30
	5.4 Pembahasan .....	31
BAB 6	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	33
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN .....	34
	7.1 Kesimpulan .....	34
	7.2 Saran .....	34
	DAFTAR PUSTAKA .....	35
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Guru Anggota MGMP PKN MA DIY .....	12
Tabel 2. Hasil Survei Pembinaan Karakter Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah DIY.....	17
Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Madrasah Aliyah (Kurikulum 2013).....	22
Tabel 4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII Madrasah Aliyah (Kurikulum 2006) .....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Praktik Kewarganegaraan dalam Bentuk Pemilu Osis untuk Pembentukan Budaya Demokrasi .....	27
Gambar 2. Kegiatan Ko-Kurikuler sebagai Pasukan Pengibar Bendera....	29
Gambar 3. Kegiatan Kemah Bersama .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	37
Lampiran 2. Rancangan Model Pembinaan Karakter Kewargaan Berbasis Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	45
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti .....	50

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini didorong oleh hasil penelitian Samsuri (2009) yang memperlihatkan arti penting gagasan masyarakat kewargaan (*civil society*) penting diwujudkan melalui proses pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Hal ini juga sejalan dengan Jonathan Miller-Lane, Tyrone C. Howard & Patricia Espiritu Halagao (2007) mengidentifikasi bahwa kompetensi kewargaan multikultural dapat dikembangkan melalui beragam kajian pembelajaran seperti *social studies* yang di dalamnya memuat topik pendidikan kewarganegaraan seperti di Amerika Serikat. Dengan *civic multicultural competence* diharapkan para guru mampu menyiapkan siswa menghadapi kehidupan masyarakat global yaitu masyarakat multikultural.

Paradigma pendidikan kewarganegaraan memasuki era reformasi di Indonesia telah mengalami perubahan kurikuler yang mendasar jika dibandingkan dengan mata pelajaran sejenisnya seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kurikulum 1994. PPKn Kurikulum 1994 sepenuhnya memuat materi nilai-nilai Pancasila menurut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Di era reformasi, menghidupkan kembali semangat ber-Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara masif disosialisasikan oleh MPR RI. Kebijakan yang dikenal ialah dengan konsep “Empat Pilar Kebangsaan dan Kenegaraan”, meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini kemudian dijadikan materi pokok dalam nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013.

Madrasah Aliyah sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah atas dengan kekhasan keagamaan Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Keindonesiaan dan Keislaman tersaji

dengan baik selama ini dalam model pendidikan nasional di Madrasah Aliyah. Demikian pula Satuan pendidikan MA di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 37 sekolah meliputi 13 MA Negeri dan 24 MA swasta. MA tersebut tersebar di lima kabupaten dan kota, masing-masing sembilan di Kabupaten Bantul, lima di Kabupaten Gunung Kidul, empat di Kabupaten Kulon Progo, 11 di Kabupaten Sleman, dan lima di Kota Yogyakarta (Dinas Pendidikan DIY, 2010).

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Masyarakat Kewargaan dan Kewargaan Multikultural

Bagaimana hubungan masyarakat kewargaan dengan demokrasi? Dengan meminjam istilah Putnam (1993) dalam karyanya, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Reiter (2009: 22) menyatakan bahwa “civil society makes democracy work.” Dalam pengertian yang serupa dapat dikatakan bahwa demokrasi akan hanya dapat berjalan baik jika masyarakat kewargaannya hidup sehat.

Ciri-ciri masyarakat kewargaan seperti dikemukakan oleh Putnam (1993: 89-91) mencakup *civic engagement; political equality; solidarity, trust, tolerance*; dan adanya *associations* sebagai *social structures of cooperation*. *Civic engagement* berarti bahwa kewarganegaraan dalam sebuah *civic community* ditandai oleh partisipasi aktif dalam urusan-urusan publik. *Political equality* mencakup pengertian bahwa kewarganegaraan dalam *civic community* memerlukan kesetaraan hak-hak dan kewajiban untuk semua warga, komunitas diikat oleh hubungan horisontal yang resiprositas dan kooperasi, bukan oleh hubungan vertikal dan dependensi. *Solidarity, trust, tolerance* tampak dalam perilaku saling membantu, memiliki kepercayaan penuh satu dengan lainnya meskipun memiliki pandangan berbeda, tetapi tetap toleran. *Associations (Social Structures of Cooperation)* diartikan sebagai asosiasi masyarakat kewargaan yang menyumbangkan keefektivan dan stabilitas pemerintahan demokratis, baik dari pengaruh “internal” atas anggota secara individual maupun dampak “eksternal” atas pemerintahan yang lebih luas.

Secara spesifik, Diamond mengidentifikasi fungsi masyarakat kewargaan untuk mendorong pengembangan dan konsolidasi demokrasi, sebagai berikut:

1. menyediakan “basis pembatasan” kekuasaan negara, kontrol negara oleh masyarakat, dan menumbuhkan institusi-institusi politik demokratis sebagai sarana paling efektif untuk kontrol tersebut.

2. merangsang partisipasi politik, meningkatkan efektivitas dan keterampilan demokrasi warga negara, dan mendorong pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban di samping hak-hak kewarganegaraan demokratis.
3. pendidikan demokrasi.
4. membangun banyak saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung, dan merepresentasikan berbagai kepentingan.
5. membangun fungsi dari *clientilisme* ke kewarganegaraan (Diamond, 2003: 300-302).

Bagaimanakah masyarakat kewargaan multikultural Indonesia? Penelitian Samsuri (2009) menunjukkan bahwa gagasan masyarakat kewargaan di Indonesia telah diperkuat oleh peran negara sejak era reformasi, terutama di era pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Pada era Habibie, masyarakat kewargaan diimajinasikan sebagai masyarakat madani. Dalam program kurikuler di sekolah, gagasan masyarakat kewargaan ditransformasikan ke dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Bagaimanakah mengukur keefektivan pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah? Meminjam rumusan *Character Education Partnership* (2003) yang telah mengembangkan standar mutu pendidikan karakter, sedikitnya ada 11 prinsip yang harus dipenuhi untuk mengetahui keefektivan program pendidikan karakter. Kesebelas aspek itu ialah sebagai berikut:

1. mempromosikan inti nilai-nilai etis sebagai dasar karakter yang baik (nilai-nilai etis yang pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa).
2. mengartikan “karakter” secara utuh termasuk pemikiran, perasaan dan perilaku.
3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk perkembangan karakter.
4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus/sekolah.
5. memberikan para peserta didik peluang untuk melakukan tindakan moral.
6. memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang dengan menghormati semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu mereka berhasil.
7. mendorong pengembangan motivasi diri peserta didik.
8. melibatkan staf/karyawan kampus (sekolah) sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter serta berupaya untuk mengikuti nilai-nilai inti yang sama yang memandu pendidikan para peserta didik.
9. memupuk kepemimpinan moral dan dukungan jangka-panjang terhadap inisiatif pendidikan karakter.

10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
11. menilai karakter kampus, fungsi staf kampus (sekolah) sebagai pendidik karakter, dan memperluas kesempatan para peserta didik untuk menampilkan karakter yang baik.

Dari kesebelas indikator pendidikan karakter yang efektif tersebut tampak bahwa, tanggung jawab pendidikan karakter tidak hanya terletak kepada peran sekolah, tetapi juga perlu melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Di lingkungan sekolah pun, pendidikan karakter perlu didukung oleh kultur sekolah yang melibatkan segenap elemen utama seperti pimpinan sekolah, guru, karyawan dan iklim berkarakter mulia di antara sesama peserta didik. Dengan demikian sebelas prinsip itu menegaskan bahwa pendidikan karakter itu akan efektif jika: (1) dilakukan secara aktif, (2) untuk individu-individu, dan (3) demi masyarakat yang baik (Hoge, 2000: 104). Dalam hal pendidikan multikultur, maka keefektivannya dapat dilihat dari bagaimana tujuan dan prinsip pendidikan dilakukan untuk agar:

- (1) semua siswa mencapai prestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- (2) belajar tentang bagaimana belajar dan berpikir secara kritis;
- (3) siswa berperan aktif dalam lingkungan belajar mereka dengan kisah dan pengalaman mereka ke dalam cakupan pembelajarannya;
- (4) menyajikan keragaman gaya belajar;
- (5) mengapresiasi sumbangan kelompok-kelompok berbeda yang berkontribusi sebagai basis pengetahuannya;
- (6) mengembangkan sikap-sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari mereka sendiri;
- (7) menjadi warga negara yang baik di sekolah, masyarakat dan negara serta dunia;
- (8) belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perbedaan perspektif;
- (9) mengembangkan identitas etnik, nasional dan global;
- (10) memberikan ketrampilan pembuatan keputusan dan analisis berpikir kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari (Paul Gorski sebagaimana diterjemahkan dari Therik, 2004: 63-64)

Pada bagian lain, Zakiyuddin Baidhawiy (2007) mengenalkan hasil kajiannya tentang pentingnya teologi multikultural, terutama di Indonesia. Dalam analisisnya, Zakiyuddin Baidhawiy menemukan bahwa identitas keagamaan Islam yang mayoritas dijumpai terutama di lembaga-lembaga pendidikan semacam madrasah aliyah, dapat menjadi tempat terbaik untuk menyemai harmoni melalui pendidikan agama berbasis teologi multikulturalis.

## 2.2 Pilar-pilar Kebangsaan Indonesia

Konsepsi “Pilar-pilar Kebangsaan” Indonesia atau lengkap dikenal dengan “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” (Setjen MPR RI, 2012) secara masif disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia semenjak periode 2009-2014 di bawah Ketua MPR Taufik Kiemas. Keempat pilar menurut MPR RI tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun ada perdebatan tentang posisi Pancasila yang menjadi salah satu pilar, karena Pancasila merupakan dasar negara, namun MPR RI bersikukuh menjadikan Pancasila sebagai salah satu dari keempat pilar berbangsa dan bernegara (Samsuri, 2012).

Pilar-pilar tersebut dalam praktiknya oleh MPR disosialisasikan melalui sejumlah media televisi, surat kabar dan *online*. Selain itu, MPR juga melakukan kegiatan semacam lomba cerdas cermat (LCC) “Empat Pilar.”

Relevansinya dengan topik penelitian ini, maka nilai-nilai karakter kewargan multicultural akan mengacu kepada buku panduan yang diterbitkan oleh MPR RI tentang empat pilar. Menurut MPR, alasan pentingnya empat pilar itu ialah karena:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan semangat kekeluargaan negara Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Dalam kaitan ini, MPR melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah dengan melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Upaya ini selanjutnya dikenal dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Setjen MPR RI, 2012: v).

### 2.3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan serta (partisipasi) aktif dalam masyarakatnya. Menurut Ruud Veldhuis (1997: 8), tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat kewargaan dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam pendidikan kewarganegaraan? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara, dimana para pendidik *civic* dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala dari yang “sangat buruk” hingga “sangat baik”. Sebutan “warga negara yang baik” (good citizen) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala tersebut. “Warga negara demokratis” adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, menurut Veldhuis (1997: 9) perbedaan pandangan tentang demokrasi membawa tipe (penskalaan) tersebut ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara. Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, “good citizen,” terdapat beberapa indikator penyebutannya.

Sejalan dengan karakter masyarakat kewargaan yang kondusif untuk kehidupan politik demokrasi, ada beberapa penjelasan tentang karakter demokratis warga negara. Branson (1999: 23-25) menyebutkan bahwa karakter kewarganegaraan yang mendukung sistem demokrasi memiliki sifat privat maupun publik yang patut dikembangkan dalam kehidupan demokrasi. Karakter tersebut antara lain mencakup karakter: menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan



politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, serta, mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Pada bagian lain, meminjam kategori sifat warga negara dari Nadine dan Clark (1989), Somantri (2001: 184-185) membagi tiga macam karakter warga negara, yaitu *sponge citizens*, *stone citizens* dan *generator citizens*. Di antara ketiga karakter tersebut, tipe *generator citizens* sejalan dengan karakter warga negara demokratis, artinya mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam sistem politiknya. *Sponge citizens* yang memiliki karakter seperti massa mengambang dan *stone citizen* yang berkarakter tidak mau melakukan perubahan cenderung tidak konstruktif untuk kehidupan demokrasi.

Pada 1990-an, pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999: 11) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai “*civic education*” yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut dengan “*citizenship education*” dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999:11-12).

Pada bagian lain, kajian pendidikan kewarganegaraan ada yang membuatnya menjadi satu mata pelajaran tersendiri. Namun ada pula yang memasukkannya secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tersendiri (*separated subject*) antara lain dapat dijumpai di Indonesia. Dengan demikian kajian pendidikan kewarganegaraan “paradigma baru” sedikitnya memuat pembahasan tentang hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia,

politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

## BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Teridentifikasi kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia di Madrasah Aliyah.
- b. Tersusun model pembinaan karakter kewargaan multikultur berbasis nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia versi MPR.

### 3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan secara teoretis memperkaya khazanah model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keIndonesiaan yang dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural.

## BAB 4 METODE PENELITIAN

### 4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu dua (2) tahun. Tahun pertama dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sekitar enam bulan efektif. Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta, meliputi observasi ke MA sampel dan FGD bersama guru-guru PKn dari MA Negeri dan Swasta se-DIY. Dari 37 MA negeri dan swasta, hanya 21 MA negeri dan swasta yang ikut serta dalam penelitian, karena keterlibatan mereka dalam MGMP PKN MA DIY.

### 4.2 Desain Penelitian

Sebagai bentuk *research and development* (R&D), maka penelitian tahun pertama dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di madrasah aliyah se-DIY.
2. Memotret pengalaman model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di madrasah aliyah se-DIY.
3. Merancang model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan.
4. Memproduksi model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di madrasah aliyah.

### 4.3 Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian ini, mengikuti klasifikasi Suharsimi Arikunto (1999, 2002), adalah *paper* dan *person*. Paper yang dimaksud adalah literatur-literatur/kepuustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa person dapat juga disebut sebagai subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi para guru Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan kultur sekolah untuk mengimplementasikan pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan. Jumlah guru yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari 21 sekolah

Tabel 1. Daftar Guru Anggota MGMP PKN MA DIY

NO	NAMA	INSTANSI
1	Retno Wardani, S. Pd	MAN 1 Yogyakarta
2	Edi Sumarno, S. Pd	MAN 2 Yogyakarta
3	Surya Triana S, S. Pd	MAN 2 Yogyakarta
4	Dra. Sri Wahyuni W	MAN 3 Yogyakarta
5	Siti Rachmawati, S. Pd	MAN Pakem Sleman
6	Dra. Siti Maimunah	MAN Maguwoharjo Sleman
7	Mu'awanah Zulaichah, S. Pd	MAN Tempel Sleman
8	Ulin Nafis, S. Pd	MAN Godean Sleman
9	Dra. Isnurwati	MAN Godean Sleman
10	Dra. Yuni Pratiwi	MAN Wonokromo Bantul
11	Agustin Budihayati P, S. Pd	MAN Gandekan Bantul
12	M. Asrofi, S. Pd, M. Pd.	MAN Gandekan Bantul
13	Etik Rochmawati, S. Pd.	MAN Gandekan Bantul
14	Wakija, S. Pd.	MAN Sabdodadi Bantul
15	Dwi Mulyono, S. Pd	MAN Lab UIN Bantul
16	N Suryani, S. Pd.	MA Ali Maksum Krapyak
17	Jazimah Mudakhiroh, S. Pd.	MA Ma'had An Nur Ngrukem
18	Sudrajad, S. Pd.	MAN Kalibawang Kulon Progo
19	Drs. Amir Ma'ruf, MA	MAN 2 Wates Kulon Progo
20	Yekti Widayati, S. Pd	MAN 2 Wates Kulon Progo
21	Ibnu Isnaini Ahmadi, S. Pd.	MAN 1 Wates Kulon Progo
22	Arief Nugraha, S. H.	MA Masyitoh
23	Zainab Winarni, S. Pd	MAN Wonosari Gunung Kidul
24	Drs. Maryanta	MA YAPPI Gubukrubuh Playen
25	Sri Suwantini, S. Pd	MA Al Hikmah Karang Mojo
26	Hartiningsih, S. Pd.	MAN 1 Yogyakarta
27	Nurokhmah, S. Pd.	MAN Wonokromo Bantul
28	Widi Hastuti, S. Pd. , M. PdI.	MAN Wonokromo Bantul
29	Mulyati, S. Pd., M. PdI.	MAN Wonosari Gunung Kidul
30	Muslimah, S.H.	MA Daarul Ulum Galur Kulon Progo

#### 4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Secara umum teknik pengumpulan dan analisis data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu studi lapangan di madrasah aliyah dan *desk study*. Studi lapangan meliputi:

1. Penyebaran angket terhadap kebutuhan pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di masing-masing madrasah aliyah se-DIY.
2. Observasi, untuk memperoleh informasi yang terjadi di lapangan.

*Desk study* dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi literatur, teknik pemanfaatan data-data sekunder serta data tertulis lainnya mengenai pilar-pilar kebangsaan di Indonesia dan kewargaan multikultural.
2. *Peer Discussion* (PD) untuk memperkokoh konstruksi analitik dan teoretik hasil kajian analisis data sementara.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para guru terhadap temuan kebutuhan pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di masing-masing madrasah aliyah se-DIY.

#### 4.5 Luaran dan Indikator

Tahun	Luaran	Indikator
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun hasil identifikasi nilai-nilai karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan menurut versi MPR RI</li> <li>2. Tersusun kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di Madrasah Aliyah.</li> <li>3. Dikembangkannya kerangka model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di Madrasah Aliyah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hasil survei kebutuhan model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di Madrasah Aliyah.</li> <li>2. Model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di Madrasah Aliyah berhasil disusun dan divalidasi dalam kegiatan FGD dan <i>Peer Discussion</i>.</li> <li>3. Dimuatnya paper dalam jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal bereputasi internasional</li> <li>4. Adanya 1 laporan utuh tentang hasil penelitian pada tahun pertama</li> </ol>

## BAB 5 HASIL YANG DICAPAI

### 5.1 Identifikasi Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah

Nilai Karakter Kewargaan Multikultural yang dikembangkan di MA bersumber kepada nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Sumber nilai pertama merupakan konsekuensi logis dari keberadaan MA sebagai lembaga pendidikan formal berbasis (kekhasaan) keagamaan Islam. Nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar pengembangan ini pun merupakan konsekuensi dari konteks kehidupan keberadaan pembentukan MA sebagai salah salah lembaga pendidikan formal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

#### 1. Nilai-nilai Ajaran Islam

Nilai-nilai ajaran Islam menjadi sumber utama pengembangan nilai karakter siswa. MA sebagai bagian utama satuan pendidikan formal jenjang sekolah menengah atas dengan ciri khas keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan produk sejarah dari hubungan antara Islam dan Negara sejak era kemerdekaan Indonesia. Di MA ini selain diajarkan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan (iman), ibadah dan urusan hidup di dunia dan *ukhrawi* (kehidupan akhirat), juga diajarkan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kurikulum MA memuat komposisi kajian ke-Islam-an baik sebagai keyakinan maupun sebagai keilmuan, dan kajian kurikuler pengetahuan umum yang diajarkan secara proporsional dalam struktur kurikulumnya. Dalam praktiknya, pengembangan kajian kurikuler di MA berpijak pada dua kaki. *Pertama*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan maka kajian kurikuler selain pendidikan agama Islam, juga diajarkan secara kajian khusus tentang Akidah, Akhlak, ulumul Qur'an, Tafsir Hadith, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. *Kedua*, Kurikulum

pendidikan umum di MA mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun Ajaran 2014/2015, di MA sudah menerapkan Kurikulum 2013 untuk kelas X, sedangkan untuk kelas XI dan XII masih menggunakan Kurikulum 2006.

Kedua macam program kurikuler tersebut menjadikan MA, sebagaimana Madrasah Ibtidaiyah di level sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah di level sekolah menengah pertama, memiliki tugas ganda. Selain membekali siswa kompetensi ilmu-ilmu keagamaan, MA juga membekali kompetensi ilmu-ilmu umum yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi MA yang demikian menjadikannya cenderung homogen secara keagamaan, yakni seluruh komponen pendidik, tenaga pendidik dan siswa beragama Islam. Namun, dalam praktik keseharian pemahaman terhadap ajaran agama Islam itu sendiri tidaklah tunggal, bahkan memiliki keanekaan yang bersifat dinamis baik di bawah payung organisasi keagamaan maupun tradisi intelektual Islam.

Nilai-nilai ajaran Islam yang menghubungkan gagasan multikultural dengan kewargaan/kebangsaan antara lain tampak dalam pernyataan Qur'an tentang penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, di mana yang membedakannya hanya kepada tingkat ketakwaan seseorang terhadap Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di sisi lain, ajaran Islam tentang pentingnya hubungan antara sesama manusia dengan segenap keragaman latar belakang dalam aspek kehidupan di dunia adalah bagian utama peran seorang muslim sebagai *khalifatullah fil ardl*. Nilai-nilai ajaran Islam yang sering dikemukakan untuk menghargai perbedaan dan keragaman baik di lingkungan sesama Muslim maupun dengan masyarakat pemeluk agama lainnya terutama tampak dalam hal semangat toleransi beragama, karena prinsipnya “bagimu agamamu, dan bagiku (Islam) agamaku.”

## 2. Nilai-nilai Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia

Nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang dikembangkan guru dalam penelitian ini ialah dokumen MPR tentang “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Dokumen memuat kajian arti penting Pancasila, UUD



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi rujukan formal materi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 oleh para guru PKn/PPKn. Di luar program kurikuler, guru-guru juga terlibat pembimbingan para siswanya dalam perlombaan “Empat Pilar” yang rutin dilaksanakan mulai tingkat Kota/Kabupaten hingga tingkat nasional. Bagi guru-guru MA se-DIY, sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan, sejak kebijakan “Empat Pilar” digulirkan MPR era 2009-2014 telah dikembangkan dalam mata pelajaran PKn di kelas X hingga XII.

Dari identifikasi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, guru-guru PPKn/PPKn MA se-DIY telah menerjemahkan materi-materi kewargaan multikultural sebagaimana dimuat dalam dokumen MPR tersebut sebagai berikut.

a. Pancasila

- 1) Nilai Ketuhanan
- 2) Nilai Kemanusiaan
- 3) Nilai Persatuan
- 4) Nilai Kerakyatan
- 5) Nilai Keadilan

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Kesetaraan Hak dan Kewajiban setiap Warga Negara.
- 2) Pengakuan dan Penghormatan setiap orang yang memiliki latar belakang berbeda.
- 3) Kewajiban Negara melindungi setiap individu warga negara yang memiliki latar belakang berbeda.

c. Bhinneka Tunggal Ika

Secara kodrati Indonesia memiliki keanekaan namun tetap dalam satu bingkai ke-Indonesia-an.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 5.2 Model Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah

Kebutuhan pembinaan karakter kewargaan multikultural di Madrasah Aliyah dilakukan melalui survei dan *focus group discussion* terhadap dan bersama-sama guru-guru PKn/PPKn di MGMP PKn MA DIY. Hasil survei kebutuhan dan perkembangan praktik pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA ditemukan datanya dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Survei Pembinaan Karakter Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah DIY

No.	Pernyataan	Jawaban (N=21)	
		Ya (%)	Tidak (%)
1.	Di sekolah ini sedang diupayakan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa berbasis Nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konstitusi), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.	90.47	9.53
2.	Sebagai guru di sekolah ini, saya memahami visi dan misi sekolah agar pembinaan karakter kewargaan multikultural yang diupayakan oleh sekolah bisa terwujud.	76.19	19.05
3.	Sebagai guru di sekolah ini, saya juga memahami bahwa sekolah memiliki program untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah.	80.95	19.05
4.	Kepala Sekolah menjadi motor utama dalam rangka mewujudkan pembinaan karakter siswa di sekolah ini.	57.14	42.85
5.	Pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh sekolah.	33.33	66.67
6.	Pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini melibatkan semua unsur sekolah mulai dari kepala sekolah, semua guru, semua karyawan, semua siswa, dan komite sekolah.	76.19	28.57
7.	Penanganan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini diserahkan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan saja.	23.8	76.19
8.	Penanganan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini melibatkan semua guru mata pelajaran.	71.42	28.57

9.	Di sekolah ini ada program-program khusus dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.	66.67	33.33
10.	Program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini dilakukan secara bertahap dengan target yang sudah direncanakan.	50	50
11.	Seluruh mata pelajaran (kurikulum) di sekolah ini diarahkan untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.	28.57	71.43
12.	Sekolah membuat peraturan khusus dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa berbasis “empat konsensus nasional/kebangsaan” di sekolah.	71.43	28.57
13.	Untuk mendukung terwujudnya karakter kewargaan multikultural siswa, sekolah mengupayakan berbagai simbol/tulisan-tulisan bermakna (artifak) di lingkungan sekolah.	61.9	38.1
14.	Sebagai guru, saya merasa senang (setuju) dengan adanya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	61.9	38.1
15.	Menurut saya, seluruh komponen sekolah setuju dengan adanya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	66.67	28.57
16.	Menurut saya, kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	71.43	28.57
17.	Menurut saya, para guru juga memiliki pengaruh yang besar dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	95.24	4.76
18.	Sarana dan fasilitas di sekolah ini sangat memadai untuk seluruh kegiatan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.	50	50
19.	Karakter kewargaan multikultural menjadi pertimbangan utama di sekolah ini dalam memberikan nilai mata pelajaran kepada para siswa.	52.38	47.62
20.	Karakter kewargaan multikultural hanya menjadi pendukung dalam memberikan nilai mata pelajaran kepada para siswa di sekolah ini.	47.62	52.38
21.	Seluruh materi pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah ini mengarah pada terbentuknya karakter kewargaan multikultural.	50	50
22.	Seluruh proses (strategi) pembelajaran di sekolah ini juga memperhatikan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.	52.38	47.62
23.	Seluruh evaluasi (penilaian) yang dilakukan oleh guru juga memperhatikan masalah karakter kewargaan multikultural.	47.62	52.38

24.	Sekolah memberikan sanksi kepada siapa pun di antara komponen sekolah yang tidak menampilkan karakter kewargaan multikultural di sekolah.	90.48	9.52
25.	Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya menjadi figur utama dan menjadi teladan (model) bagi yang lain dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah.	95.24	4.76
26.	Para siswa diberi tanggung jawab untuk ikut bersama-sama mendukung terlaksananya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	95.24	4.76
27.	Komite sekolah dan seluruh orang tua siswa juga diberi tanggung jawab untuk mendukung program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.	85.71	14.29

Keterangan: Kolom persentase yang tidak genap 100 %, disebabkan ada responden memberi jawaban YA dan TIDAK atau sama sekali kosong.

Dari Tabel 2 di atas meskipun sebagian besar tidak secara eksplisit visi dan misi dari seluruh MA menyebutkan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural di sekolah masing-masing, namun 90.47 persen sekolah mengupayakannya tertanam pada diri siswa. Hal menarik lain adalah bahwa bobot pembinaan karakter kewargaan multikultural justru lebih banyak ditekankan kepada komponen kultur sekolah, sedangkan bobot program kurikuler hanya sedikit. Hanya 28.57 persen sekolah yang menyatakan bahwa sekolah mengarahkan materi mata pelajaran untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu, komitmen segenap komponen sekolah, orang tua dan komite sekolah sangat penting untuk ketercapaian tujuan pembinaan karakter kewargaan multikultural di Madrasah Aliyah. Namun, gurulah yang menjadi aspek utama keberhasilan, di antara komponen sekolah lainnya.

Pembinaan karakter kewargaan multikultur para peserta didik di sekolah dilakukan melalui program kurikuler dan kultur sekolah. Program kurikuler terutama mengandalkan kepada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas X, dan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas XI dan XII. Pada bagian lain, kultur sekolah untuk pembinaan karakter kewargaan multikultur dikembangkan melalui pembiasaan

perilaku menghormati dan menghargai keragaman latarbelakang segenap unsur sekolah, baik peserta didik, karyawan, guru maupun pimpinan sekolah.

## **1. Model Kurikuler**

### **a. Program Intra Kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Kegiatan pembinaan kewargaan multikultural dilaksanakan sesuai pada materi yang terkait dalam pelajaran, dan dilakukan oleh gurunya masing-masing. Materi tersebut muncul secara eksplisit dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sosiologi. Dan secara implisit pada mata pelajaran lain, misalnya aqidah akhlak, sejarah, penjaskes, dan lain-lain. Pada bagian lain, Pada Tahun Ajaran 2014/2015 di Madrasah Aliyah secara nasional masih berlaku Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X berlaku Kurikulum 2013.

Dalam penelitian ini, pilar-pilar kebangsaan yang menjadi inti karakter kewargaan multikultural di Madrasah Aliyah diajarkan sebagai materi pokok dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013. Pilar-pilar kebangsaan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X dijabarkan dengan mengikuti Kompetensi Dasar dalam Struktur Kurikulum 2013 dan Buku Siswa serta Buku Guru.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas XI dan XII tidak secara eksplisit membagi materi pelajarannya ke dalam empat pilar tersebut. Meskipun demikian guru-guru dalam MGMP PKn DIY mengelaborasi karakter kewargaan multikultur dari pilar-pilar kebangsaan berdasarkan kepada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII.

Pilar-pilar kebangsaan yang menjadi materi pembinaan karakter kewargaan multikultural secara kurikuler di Kelas X dijabarkan mengikuti kompetensi dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti dimuat dalam Tabel 3. Dalam Tabel 3 tampak jelas bahwa komponen materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas empat materi pokok, yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sejalan dan mengacu kepada keputusan MPR RI periode 2009-2014 untuk menjadi keempat materi yang disebut dengan “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia.”

Keempat materi pokok itu disebar pencapaiannya ke dalam empat aspek kompetensi inti dan kompetensi dasar, meliputi aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Di Kelas X, aspek penting kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan membahas tentang (1) kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, (2) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bentuk dan kedaulatan Negara, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI, serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, (5) indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran berbangsa dan bernegara dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.

Kesadaran multikultural peserta didik sebagai warga negara yang dimuat dari komponen kompetensi dan materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut yakni *pertama*, pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan gender sebagaimana dikehendaki dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, *kedua*, keanekaan bangsa Indonesia menjadi kekuatan yang mengikat pencapaian tujuan kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. *Ketiga*, integrasi nasional dari sifat keanekaan bangsa dan pembentukan negara serta kesadaran sejarah dan geopolitik Indonesia itu diperlukan dalam menghadapi setiap ancaman nasional terhadap keberadaan NKRI.

Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Madrasah Aliyah (Kurikulum 2013)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	<p>1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	<p>2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum.</p> <p>2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.</p> <p>2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

<p>tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.</p> <p>3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.</p>
<p>4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI</p> <p>4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p>



	<p>4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia</p> <p>4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>
--	--

Sementara itu, Tabel 4 menampilkan program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII. Untuk Kelas XI cakupan materi pokok meliputi budaya politik, budaya demokrasi masyarakat madani, keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta sistem hukum dan peradilan internasional. Untuk Kelas XII kajian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, berbagai sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dan dampak globalisasi.

Materi pokok di Kelas XI dan XII tidak secara eksplisit pengelompokannya ke dalam empat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dimaksudkan dalam Kurikulum 2013 pada Kelas X. Namun, apabila dicermati secara rinci dalam materi pokoknya dalam komponen kompetensi dasarnya akan tergambar empat pilar itu. Adapun karakter kewargaan multikultur sangat besar peluangnya dikembangkan dari materi-materi seperti budaya politik dan demokrasi, serta karakter masyarakat madani yang memandang penting sikap rekognisi dan respek terhadap setiap kebhinnekaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tabel 4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII Madrasah Aliyah (Kurikulum 2006)

<b>Kelas/ Semester</b>	<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
XI/1	1. Menganalisis budaya politik di Indonesia	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
	2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
	3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
XI/2	4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional	4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara 4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik

		<p>4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional</p> <p>4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia</p>
	5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional	<p>5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional</p> <p>5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional</p> <p>5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional</p>
XII/1	1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	<p>1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka</p> <p>1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan</p> <p>1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka</p>
	2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan	<p>2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara</p> <p>2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia</p> <p>2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain</p>
XII/2	3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi	<p>3.1 Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia</p> <p>3.2 Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia</p> <p>3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia</p>

	4. Mengevaluasi dampak globalisasi	<p>4.1 Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>4.2 Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia</p> <p>4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia</p> <p>4.4 Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia</p>
--	------------------------------------	---

Pembentukan karakter kewargan secara tegas disajikan di kelas XI Semester Gasal ketika menyajikan topik Budaya Politik dan Budaya Demokrasi. MA di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana juga jenjang SMA lainnya, bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, diselenggarakan Pemilihan Umum OSIS (PEMILOS) untuk memilih pengurus OSIS. Pada saat penelitian berlangsung, baru diadakan persiapan-persiapan Pemilos untuk calon pengurus baru Osis di MA se-Kabupaten Bantul. Kegiatan Pemilos terutama saat pemberian suara meniru proses pemungutan suara pemilu nasional dan pemilu langsung kepala daerah (Pilkada). Pemilos ini selain mengajarkan sistem demokrasi langsung, dan partisipasi siswa dalam OSIS, juga diajarkan nilai-nilai menghormati dan menghargai perbedaan dana keragaman aspirasi setiap siswa.



Gambar 1. Praktik Kewarganegaraan dalam Bentuk Pemilu Osis untuk Pembentukan Budaya Demokrasi (Dok. MAN Gandekan, Bantul, 2013)

#### b. Program Ko-Kurikuler

Program ko-kurikuler dalam pembinaan karakter kewargaan multikultur dimaknasi sebagai serangkaian aktivitas peserta didik yang berkaitan langsung dengan tujuan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI dan XII serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kelas X. Sebagian besar program ko-kurikuler yang teridentifikasi telah dilakukan oleh siswa Kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X yang sudah terlaksana ialah berkaitan dengan kegiatan upacara bendera dan kegiatan kerohanian.

Program kurikuler yang telah dijalankan antara lain berupa kewajiban setiap siswa atau kelompok kelas untuk melakukan aktivitas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya pembinaan karakter kewargaan multikultur. Program tersebut meliputi kegiatan sebagai petugas upacara bendera secara bergiliran; kesempatan menjadi petugas *Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)*; mengikuti lomba-lomba, misalnya : *Lomba Cerdas Cermat (LCC)* “Empat Pilar MPR”, *LCC Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta*, *Lomba Debat*, *Lomba Peleton Inti* (tonti); Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain, misalnya *Kemah Kerukunan antar Umat Beragama*, yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dan lain-lain. Semua program itu ada yang terencana namun ada pula yang dilakukan secara insidental.

#### c. Program Ekstra-Kurikuler

Program pembinaan karakter kewargaan multikultur di bidang ekstra kurikuler yang diklaim dilakukan oleh sejumlah MA DIY antara lain kegiatan Pramuka, Tonti, Palang Merah Remaja (PMR), *Civic Club*, *English Club*, *Javanese Club* dan *futsal*. Program-program ekstra-kurikuler tersebut ada yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran PKn/PPKn, tapi ada juga yang sama sekali tidak berhubungan langsung. Namun, dalam praktiknya program ekstra-kurikuler diselenggarakan untuk menyalurkan minat dan bakat serta menanamkan semangat kebangsaan (Pramuka), kemampuan pemecahan masalah, dan pelestarian budaya.



Gambar 2. Kegiatan Ko Kurikuler sebagai Pasukan Pengibar Bendera (Dokumen MAN Wonokromo, Bantul, 2013).



Gambar 3. Kegiatan Kemah Bersama (Dok. MAN Wonokromo, Bantul, 2013).

## 2. Model Kultur Sekolah

Keteladanan dan habituasi **penghormatan (respek)** dan **pengakuan (rekognisi)** terhadap perbedaan dan keragaman oleh pimpinan MA (kepala dan wakil kepala MA), tenaga pendidik dan kependidikan, dan siswa. Dua sikap karakter ini yang kemudian dikembangkan dalam model pembinaan karakter kewargaan multikultur di MA.

Hal menarik yang perlu dikemukakan di sini ialah implementasi karakter multikulturalis yang dikembangkan sebagai kultur sekolah. Sebagai contoh, MAN

Maguwoharjo Kabupaten Sleman mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan sekolah inklusif, yakni menerima dan memperlakukan siswa berkebutuhan khusus dalam kelompok tunanetra untuk belajar bersama-sama dengan siswa lainnya yang tidak menyandang tunanetra. MAN ini dianggap berhasil menanamkan kesadaran dan perilaku untuk menghargai dan menghormati keadaan setiap siswa yang berkebutuhan khusus (keterbatasan indera penglihatan) dengan sesama siswa lainnya serta komponen lain sekolah. Prinsipnya setiap siswa diberi kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan keterbatasan fisik individu siswa.

Pada bagian lain, MAN Yogyakarta 1 dalam pembelajaran PKn terutama di Kelas XI dan XII mengajarkan pentingnya mengakui dan menghormati keragaman kultural dengan mengenalkannya dalam Laboratorium IPS Terpadu. Siswa dari berbagai daerah di luar DIY setiap kembali dari masa liburan sekolah agar membawa sejumlah keunikan kultural dalam bentuk cinderamata karya budaya (kriya atau sejenisnya) yang mencerminkan kekhasan budaya dan etnik dari daerah masing-masing siswa. Siswa diminta mengekspresikan kekayaan dan keragaman khas asal masing-masing siswa.

Namun, tidak seluruh sekolah (MA) mengalami pembiasaan pembentukan karakter kewargaan multikultural secara memadai. Di salah satu MAN, justru ada sikap “penolakan” terhadap pentingnya simbol-simbol negara dan pentingnya sikap multikulturalis para siswa sebagai warga negara Indonesia. Oleh guru PKn dijelaskan, bahwa sikap ini merupakan akibat dari kultur sekolah yang kondusif untuk tumbuhnya sikap-sikap seperti itu di sekolah. Terlebih lagi tumbuh pandangan bahwa multikultural adalah konsep Barat, yang bertentangan dengan konsep Islam sebagai nilai-nilai universal, di samping Islam sendiri penting dan berlaku umum bagi siapa saja tanpa membedakan umat manusia kecuali dari ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### 5.3 Kendala Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural di Madrasah Aliyah

Upaya pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA yang teridentifikasi di DIY, belum seluruhnya menampakkan keberhasilan. Ada

sejumlah kendala berkaitan dengan pemahaman multikulturalis di antara komponen sekolah dan siswa, juga dari masyarakat sekitar itu sendiri.

Salah satu guru menyadari bahwa MA dipandang masyarakat masih bersifat eksklusif pengajarannya, selain karena latarbelakang siswa semua beragama Islam, juga ada pemikiran bahwa MA hanya mengajarkan soal-soal keagamaan belaka. Konsekuensinya, siswa yang tidak beragama Islam tidak mungkin dimasukkan ke MA oleh orangtuanya, tetapi akan dipilhkan sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta. Secara internal, MA belum siap memperkenalkan secara utuh keberadaan ajaran-ajaran agama di luar Islam, terutama di perpustakaanannya, yang tidak mengenalkan kitab agama selain Islam, seperti Taurat, Zabur dan Injil, atau contoh pakaian kebesaran bila pemimpin agama lain memimpin acara keagamaan terutama agama yang diakui di Indonesia.

Pada bagian lain, guru juga menyadari bahwa *stakeholder* sekolah belum sepenuhnya tumbuh kesadaran terhadap urgensi pembinaan karakter itu sebagai tanggungjawab bersama, bukan hanya guru agama, PKn atau BK semata. Selama ini pembinaan karakter hanya dititikberatkan pada kewajiban guru-guru tertentu, seperti guru agama, PKn atau BK.

#### 5.4 Pembahasan

Kajian tentang pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di MA barangkali baru kali pertama dilakukan. Untuk itu, bukan hal mudah untuk menilai apakah proses dan hasil pembinaan karakternya sudah berhasil atau sesuai dengan kaidah yang diharapkan atautkah perlu ditindaklanjuti dengan program tindakan/intervensi.

Karakter kewargaan multikultural yang dibangun di sekolah khas keagamaan Islam sulit diidentifikasi karena belum ada standard penilaian atau instrumentasi yang baku untuk menaakarnya. Hanya saja, secara empirik pembinaan karakter secara umum di MA berdasarkan kategori keefektifan pendidikan karakter menurut rumusan *Character Education Partnership* (2003), hampir seluruh komponen terpenuhi. Meski demikian, pelibatan *stakeholder* MA untuk dimensi karakter kewargaan multikultural perlu dikaji lebih dalam.



Penekanan kepada program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesungguhnya meyakinkan banyak pihak bahwa tuntutan pembentukan karakter warga negara yang baik yang toleran dan positif terhadap keragaman, secara langsung diajarkan oleh mata pelajaran ini. Sungguh pun dalam pelajaran Agama diajarkan sikap *tasamuh* (toleran) terhadap orang yang berbeda-beda afiliasi bahkan keyakinan agamanya pun, namun pesan kuat pembinaan karakter kewargaan multikultural diarahkan kepada mata pelajaran PKn/PPKn.

Pilihan terhadap “ pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan ” sebagaimana dimaksudkan oleh MPR Periode 2009-2014, sebagai *core matter* dan *core values* dari pembinaan karakter kewargaan multikultur merupakan gayung bersambut dengan kebijakan program kurikuler PKn dan PPKn, terutama Kurikulum 2013. Materi pokok PPKn Kurikulum 2013 menjadi bagian penting nilai-nilai utama yang harus dirujuk dalam pembinaan karakter kewargaan multikultur.

Dari hasil survei dan FGD terhadap guru-guru anggota MGMP PKN DIY tentang topik penelitian ini, disadari betul bahwa pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah khas keagamaan Islam seperti MA masih terbatas dan lebih banyak menitikberatkan kepada program kurikuler di kelas. Ini disadari karena tuntutan pembentukan karakter siswa secara umum masih bertumpu kepada mata pelajaran pembentukan kepribadian seperti pendidikan agama dan PPKn/PKn. Dengan demikian keefektifan pembinaan karakter kewargaan multikultur sebagai bagian *grand design* pendidikan karakter di sekolah masih perlu diteruskan kajian mendalamnya dalam penelitian berikutnya.

Pada bagian lain, “ kesadaran ” tentang eksklusivitas identitas sekolah berbasis kekhasan agama Islam oleh para guru tidak menjadi halangan untuk menanamkan dan menumbuhkan karakter kewargaan multikultur siswa dan elemen sekolah lainnya. Hanya saja, komitmen multikulturalis dari pimpinan sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan siswa itu sendiri merupakan modal besar yang harus dihadirkan untuk membangun sikap dan perilaku multikulturalis di sekolah semacam MA.

BAB 6  
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

*Tahun Kedua.*

1. Validasi model model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di madrasah aliyah.
2. Menguji coba model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di satu madrasah aliyah negeri dan swasta di salah satu kabupaten dan kota DIY yang menjadi sampel uji coba model.
3. Merevisi dan mendiseminasi buku model pembinaan karakter kewargaan multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan di madrasah aliyah.

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang diidentifikasi dari “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan” MPR telah dikembangkan secara langsung dan tidak langsung baik di dalam program kurikuler (pembelajaran) maupun kultur sekolah.

Secara praktis, model pembinaan karakter kewargaan multikultural yang diidentifikasi dari “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan” MPR belum disistematisasi sebagai model baku yang dapat diimplementasikan di tiap lingkungan pendidikan, terutama program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (MA).

#### 7.2 SARAN

Model pembinaan karakter kewargaan multikultural yang diidentifikasi dari “Pilar-pilar Kebangsaan dan Kenegaraan” MPR meskipun subjek penelitian berasal dari sekolah berciri khas keagamaan, namun produk model ini seyogianya dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah menengah secara umum di luar MA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S. (1999). "Dasar-dasar *Civic Education*," dalam Margaret S. Branson, *et al. Belajar Civic Education dari Amerika*. Terj. Syafruddin, M. Nasir Alimi, dan M. Nur Khoiron. Yogyakarta: LKiS, pp. 1-88.
- Character Education Partnership. (2003). *Character Education Quality Standards*. Washington: Character Education Partnership
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press
- Dinas Pendidikan Provinsi DIY. (2010). *Data Madrasah Aliyah*.
- Hoge, J.D. (2002). "Character Education, Citizenship Education and Social Studies." *Social Studies*, Vol. 93 No 3, pp. 103-108
- Jonathan Miller-Lane , Tyrone C. Howard & Patricia Espiritu Halagao (2007). "Civic Multicultural Competence: Searching for Common Ground in democratic Education," *Theory & Research in Social Education*, 35:4, 551-573
- Prasetyo, H. *et.al.* (2002). *Islam & Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Print, M. (1999). "Introduction, Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific." dalam Murray Print, James Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN Academic Press, pp. 9-18
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Reiter, B. (2009). "Civil Society and Democracy: Weimar Reconsidered." *Journal of Civil Society*, Vol. 5, No. 11, June, pp. 21-34
- Samsuri. (2009). *Transformasi Masyarakat Kewargaan (Civil Society) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)*. Laporan Penelitian. Bandung: LPPM UPI
- Samsuri. (2012). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Setjen MPR RI. (2012) *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Setjen MPR RI
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta Jakarta

- Therik, T. (2004), "The Notion of Context in Multicultural Education: A Nusa Tenggara Timur Case." Dalam Kamanto Sunarto, *et al. Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia & Yayasan Tifa, pp. 61-72.
- Veldhuis, R. (1997). "Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competencies, Variables, and International Activities," makalah disajikan di *Council for Cultural Cooperation*, F-67075 Strasbourg Cedex, Perancis, 25 November.
- Zakiyuddin Baidhawiy (2007). "Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia," *British Journal of Religious Education*, 29:1, 15-30

## Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Nama Peserta FGD : .....  
Asal Sekolah (MA) : .....  
Hari/Tgl. : .....

### MATERI *FOCUS GROUP DISCUSSION* MGMP PKN MADRASAH ALIYAH SE-DIY

1. Apakah visi dan misi sekolah (MA) Bapak/Ibu mengenalkan arti penting **Nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konstitusi), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika?**
2. Apakah sekolah (MA) Bapak/Ibu memiliki program pembinaan karakter kewargaan multikultural?
3. Jika ya, bagaimanakah penjabaran visi misi sekolah tersebut untuk membentuk karakter kewargaan multikultural berbasis empat konsensus nasional tersebut?
4. Jika tidak/belum, bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mengaktualisasikan arti penting **Nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konstitusi), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika** sebagai sumber nilai pembinaan karakter kewargaan multikural di sekolah (MA)?
5. Siapa sajakah yang terlibat dalam penjabaran visi dan misi sekolah (MA) untuk mendukung pembinaan karakter kewargaan multikultural di sekolah(MA) Bapak/Ibu?
6. Apakah sekolah (MA) secara khusus menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa melalui program kurikuler seperti Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah (MA) Bapak/Ibu?  
Jika ya, seperti apa bentuknya?.....  
Jika tidak, mengapa? .....
7. Program-program apa sajakah yang dilakukan sekolah (MA) Bapak/Ibu terkait dengan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA)?
  - a. Program Kurikuler/Intra-kurikuler:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
  - b. Program Ko-kurikuler:.....  
.....  
.....  
.....
  - c. Program Ekstra-kurikuler:.....

.....  
 .....

8. Bagaimanakah program-program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa tersebut di sekolah (MA) Bapak/Ibu dilaksanakan?

a. Program Kurikuler/Intra-kurikuler:

.....  
 .....

b. Program Ko-kurikuler:

.....  
 .....

b. Program Ekstra-kurikuler:

.....  
 .....

9. Apa saja karakter kewargaan multikultural yang ditekankan untuk siswa di sekolah dari nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, Wawasan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?

No.	Indikator Karakter Kewargaan Multikultural
A.	<b>Nilai-nilai Pancasila</b>
1.	Ketuhanan: (menghormati perbedaan keyakinan beragama, toleran, dst)
	..... .....
2.	Kemanusiaan: (menghormati harkat dan martabat sesama manusia tanpa membedakan SARA, dst)
	..... .....
3.	Persatuan: (mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan tanpa membedakan latar belakang SARA, dst.)
	..... .....
4.	Kerakyatan:
	..... .....

5.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Keadilan: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<b>B</b>	<p><b>UUD 1945: (Falsafah dan Cita-cita Nasional, Panduan Normatif Berbangsa yang dibuat para pendiri negara tanpa membedakan SARA, dst.)</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<b>C.</b>	<p><b>WAWASAN NKRI; (Hakekat NKRI, Keragaman suku, bahasa daerah, geografis, keragaman kultur Indonesia, dst)</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<b>D.</b>	<p><b>WAWASAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: (makna seloka Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai, aktualisasi, dst)</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

10. Apa saja yang telah dilakukan sekolah (MA) Bapak/Ibu dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa yang berbasis empat konsensus nasional/kebangsaan?

a. Misalnya, untuk perilaku menghormati keanekaragaman maka dilakukan .....



- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

11. Bagaimanakah peran kepala sekolah (MA) dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu?
12. Bagaimanakah peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa melalui mata pelajaran tersebut?
13. Bagaimana pula peran para guru lain dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa melalui mata pelajaran yang diampu Bapak/Ibu?
14. Bagaimanakah peran pegawai administrasi/karyawan sekolah (MA) dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu?
15. Bagaimanakah peran komite sekolah dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu?
16. Bagaimanakah peran orang tua siswa dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa (MA)?
17. Bagaimanakah peran masyarakat di sekitar sekolah dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA)?
18. Bagaimana bentuk penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu? (Misalnya: siswa melakukan *bullying* atas dasar SARA, diskriminasi atas dasar SARA, dst.).
19. Bagaimana pula bentuk penanganan terhadap pelanggaran tersebut yang mungkin dilakukan oleh guru atau karyawan di sekolah (MA) Bapak/Ibu?
20. Apa hasil nyata yang bisa disebutkan dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu yang berbasis empat konsensus nasional/kebangsaan hingga sekarang ini!
21. Program-program apa terkait dengan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA) Bapak/Ibu yang hingga sekarang belum terwujud?

22. Apa sajakah faktor pendukung dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA)?
23. Apa sajakah faktor penghambat dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA)?
24. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah (MA) dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa tersebut?
25. Apakah dapat disebutkan hal-hal penting yang lain dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah (MA)?
26. Apa saran-saran Bapak/Ibu untuk perwujudan karakter kewargaan multikultural siswa berbasis **Nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konstitusi), Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika** di sekolah (MA) Bapak/Ibu?

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA**  
**BAGI GURU**

1. Nama : .....
2. Pendidikan : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. Jabatan Sekarang : .....
5. Mata Pelajaran yang Diampu : .....
6. Sekolah : .....

Berilah tanda conteng (√) pada kolom jawaban yang tersedia (ya/tidak) yang paling sesuai dengan kondisi/pendapat Anda. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga bermanfaat!

No.	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Di sekolah ini sedang diupayakan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa berbasis <b>Nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.</b>		
2.	Sebagai guru di sekolah ini, saya memahami visi dan misi sekolah agar pembinaan karakter kewargaan multikultural yang diupayakan oleh sekolah bisa terwujud.		
3.	Sebagai guru di sekolah ini, saya juga memahami bahwa sekolah memiliki program untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah.		
4.	Kepala Sekolah menjadi motor utama dalam rangka mewujudkan pembinaan karakter siswa di sekolah ini.		
5.	Pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh sekolah.		
6.	Pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini melibatkan semua unsur sekolah mulai dari kepala sekolah, semua guru, semua karyawan, semua siswa, dan komite sekolah.		
7.	Penanganan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini diserahkan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan saja.		
8.	Penanganan dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini melibatkan semua guru mata pelajaran.		

No.	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
9.	Di sekolah ini ada program-program khusus dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.		
10.	Program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini dilakukan secara bertahap dengan target yang sudah direncanakan.		
11.	Seluruh mata pelajaran (kurikulum) di sekolah ini diarahkan untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.		
12.	Sekolah membuat peraturan khusus dalam rangka pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa berbasis “empat konsensus nasional/kebangsaan” di sekolah.		
13.	Untuk mendukung terwujudnya karakter kewargaan multikultural siswa, sekolah mengupayakan berbagai simbol/tulisan-tulisan bermakna (artifak) di lingkungan sekolah.		
14.	Sebagai guru, saya merasa senang (setuju) dengan adanya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
15.	Menurut saya, seluruh komponen sekolah setuju dengan adanya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
16.	Menurut saya, kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
17.	Menurut saya, para guru juga memiliki pengaruh yang besar dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
18.	Sarana dan fasilitas di sekolah ini sangat memadai untuk seluruh kegiatan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.		
19.	Karakter kewargaan multikultural menjadi pertimbangan utama di sekolah ini dalam memberikan nilai mata pelajaran kepada para siswa.		
20.	Karakter kewargaan multikultural hanya menjadi pendukung dalam memberikan nilai mata pelajaran kepada para siswa di sekolah ini.		
21.	Seluruh materi pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah ini mengarah pada terbentuknya karakter kewargaan multikultural.		
22.	Seluruh proses (strategi) pembelajaran di sekolah ini juga memperhatikan pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa.		
23.	Seluruh evaluasi (penilaian) yang dilakukan oleh guru juga memperhatikan masalah karakter kewargaan multikultural.		

No.	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
24.	Sekolah memberikan sanksi kepada siapa pun di antara komponen sekolah yang tidak menampilkan karakter kewargaan multikultural di sekolah.		
25.	Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya menjadi figur utama dan menjadi teladan (model) bagi yang lain dalam pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah.		
26.	Para siswa diberi tanggung jawab untuk ikut bersama-sama mendukung terlaksananya program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
27.	Komite sekolah dan seluruh orang tua siswa juga diberi tanggung jawab untuk mendukung program pembinaan karakter kewargaan multikultural siswa di sekolah ini.		
28.	Menurut saya sekolah (MA) yang ingin mewujudkan karakter kewargaan multikultural siswa itu harus .....		
29.	Menurut saya, untuk terwujudnya sekolah (MA) yang seperti itu (no. 28), guru (termasuk kepala sekolah) dan karyawan sekolah seharusnya .....		
30.	Menurut saya, karakter kewargaan multikultural siswa sebagai hasil pembinaan sekolah (MA) ini adalah seperti berikut .....		

**Lampiran 2. Rancangan Model Pembinaan Karakter Kewargaan Berbasis Pilar-Pilar  
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

**PEMBINAAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL  
BERBASIS NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN,  
SERTA KEARIFAN LOKAL DI MADRASAH ALIYAH**

**Rancangan Model**

Tim Peneliti:  
SAMSURI  
MARZUKI

FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014

## A. Pengantar

“Pesan politik” Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Pilar Bhinneka Tunggal Ika yang diusung secara gamblang dalam dokumen Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 makin mempertegas bahwa kehidupan multikultural di Indonesia mensyaratkan dua hal pokok, yaitu **rekognisi** dan **respek** terhadap keberadaan orang lain di sekitarnya (selanjutnya lihat Amy Guttmann, ed. 1994). Dengan demikian, mustahil implementasi ke-bhinneka-an menjadi keniscayaan, apabila sikap saling menghargai keunikan setiap individu dan mengakui eksistensi orang lain tidak menjadi perilaku kehidupan dari tiap-tiap warga negara. Masalahnya, seberapa biasa dan mampukah dunia pendidikan, antara lain melalui program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan, berhasil mendorong perilaku respek dan rekognisi terhadap ke-bhinneka-an mulai dari lingkup pribadi pendidik hingga komunitas sekolah dan masyarakat sekitar peserta didik?

Faktor penting keteladanan dalam pembentukan sikap respek dan rekognisi terhadap ke-bhinneka-an setiap orang/kelompok masyarakat menjadi penting. Di kelas, guru adalah teladan utamanya bagi para siswanya. Di sekolah, kepala sekolah dan segenap dewan guru beserta tenaga administrasi menjadi komponen penting lainnya yang dapat menyemai kultur respek dan rekognisi tersebut. Bagaimana bisa respek dan rekognisi terbangun di hati nurani dan kesadaran nalar para siswa, jika para guru menistakan martabat dan kehormatan murid-muridnya yang beraneka latar belakang? Kurikulum 2013, di luar suka dan tidak suka, tampak berusaha mendorong pengakuan dan penghormatan ke-bhinneka-an manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara kongkrit.

## B. PENGERTIAN DASAR

1. DESAIN PENDIDIKAN KARAKTER
2. KEWARGAAN MULTIKULTURAL
3. NILAI-NILAI KEAGAMAAN
4. NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN INDONESIA
5. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YOGYAKARTA
6. MADRASAH ALIYAH

## C. DESAIN PENDIDIKAN KARAKTER

### *Model Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural*



(Kemdiknas, 2010)

## STRATEGI MIKRO DI SEKOLAH



(Kemdiknas, 2010)



D. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL

No.	INDIKATOR KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL	NILAI-NILAI KEAGAMAAN	NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN				NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YOGYAKARTA
			PANCASILA	UUD 1945	NEGARA KESATUAN RI	BHINNEKA TUNGGAL IKA	
1	<b>Pengakuan terhadap Keragaman</b> Latar Belakang (Kultural, Keyakinan, Sosial) Setiap Individu Warga Negara						
2	<b>Penghormatan terhadap Keragaman</b> Latar Belakang (Kultural, Keyakinan, Sosial) Setiap Individu Warga Negara						

**E. PEMBINAAN KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL DALAM PROGRAM KURIKULER**

1. NILAI KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL DALAM KURIKULUM 2006 DAN 2013
2. NILAI KARAKTER KEWARGAAN DALAM BUKU AJAR DAN SUMBER BELAJAR LAINNYA (KURIKULUM 2006 DAN KURIKULUM 2013)
3. PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PROGRAM KURIKULER
4. PENGEMBANGAN SITUS KARAKTER KEWARGAAN MULTIKULTURAL BERBASIS LABORATORIUM IPS DAN MASYARAKAT

**F. PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PROGRAM KULTUR MADRASAH**

1. PERAN PIMPINAN DAN STAF SEKOLAH
2. ORGANISASI KESISWAAAN
3. KOMITE SEKOLAH DAN ORANG TUA

### Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

#### Biodata Ketua Peneliti:

##### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Samsuri, M.Ag.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	197206192002121001
5	NIDN	0019067206
6	Tempat, Tanggal Lahir	Hargeulis, 19 Juni 1972
7	E-mail	<a href="mailto:samsuri@uny.ac.id">samsuri@uny.ac.id</a>
8	No. Telepon/ HP	081805950338
9	Alamat Kantor	Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
10	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 ext. 595/0274-548201
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 14 orang, S2= 2 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Pendidikan Pancasila 3. Dasar-dasar Pendidikan Moral 4. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan 5. Moral Agama

##### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IKIP Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam	Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Masuk-Lulus	1991-1997	1998-2000	2006-2010
Judul Tugas Akhir	Studi Penyelesaian Perang Sipil di Bosnia-Hercegovina (1992-1996)	Perjuangan Masyumi Menghadapi Komunisme Pada Era Demokrasi Liberal (1950-1957): Suatu Kajian Pendidikan Politik	Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan ( <i>Civil Society</i> ) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd. 2. Drs. Mudjono	Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.	1. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. 2. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 3. Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

##### C. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Penggunaan Sumber Kepustakaan dalam Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	DIPA UNY	15
2.	2009	Transformasi Masyarakat Kewargaan ( <i>Civil Society</i> ) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)	Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor SPs UPI Bandung	42,55

3.	2009	Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Politik Pendidikan di Indonesia Pasca-1998	DIPA FISE UNY	5
4.	2006	Penanaman Nilai Moral Model Manajemen Qolbu	DIPA FISE UNY	2,5
5.	2009	Transformasi Masyarakat Kewargaan ( <i>Civil Society</i> ) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)	Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor SPs UPI Bandung	42,55

#### D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH BERBASIS PENELITIAN DI JURNAL UNTUK GURU PKN SMP/MTs SE-KABUPATEN BANTUL	DIPA FISE UNY	5

#### E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011	Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia	XXX/2	CAKRAWALA PENDIDIKAN
2.	2010	<i>Transforming Islamic Values Into Civic Education (A Preliminary Study in the Islamic Higher Education Institutions in Indonesia)</i>	IX/2	MILLAH
3.	2009	Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan	2/2	ACTA CIVICUS
4.	2007	<i>Civic Education Berbasis Pendidikan Moral di Cina</i>	1/1	ACTA CIVICUS
	2006	Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan	V/2	MILLAH

#### F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2012	Pendidikan Karakter Warga Negara	vii+98	Pustaka Hanif Surakarta
2.	2011	<i>Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Membangun Karakter Warga Negara Demokratis.</i> Dalam Darmiyati Zuchdi (ed.). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK. UNY PRESS, pp. 356-383. ISBN 978-979-8418-63-1		UNY Press, Yogyakarta

#### G. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Yogyakarta, 28 Oktober 2014  
Peneliti,

(Dr. Samsuri, M.Ag.)  
NIP.197206192002121001

**Biodata Anggota Peneliti:**

1.	Nama Lengkap	: Dr. Marzuki, M.Ag.			
2.	Jenis Kelamin	L			
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala			
4.	NIP	196604211992031001			
5.	NIDN	<b>0021046607</b>			
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 21 April 1966			
7.	Program Studi	: PIPS PPs UNY			
8.	Mata Kuliah yang Diampu	: 1. Pendidikan Agama Islam 2. Hukum Islam 3. Moral Agama			
9.	Alamat Kantor	Prodi PIPS PPS Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281			
10.	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 ext. 595/0274-548201			
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 30 orang S2 = 20 Orang S3=1 orang			
Pendidikan					
	<b>No.</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Program Studi/Fak.</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Negara</b>
	1.	Sarjana	Pend. Bahasa Arab/Tarbiyah	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Indonesia
	2.	Magister	Pengkajian Islam/PPs	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Indonesia
	3.	Doktor	Pengkajian Islam/PPs	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Indonesia
9.	Pengalaman Penelitian				
	<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Posisi Keterlibatan</b>	<b>Penyandang Dana</b>	<b>Tahun</b>
	1.	Pembelajaran Moral Melalui Mata Kuliah Hukum Islam di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.	Ketua	DIPA UNY	2006
	2.	Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad Saw. dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)	Anggota	DP2M Dikti Depdiknas	2007
	3.	Budaya Berbusana dalam Rangka Implementasi Nilai-nilai Moral Religius di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta	Anggota	DIPA UNY	2008
	4.	Pembentukan Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Ketua	DIPA UNY	2008
	5.	Model Birokrasi Pemerintah Era Otonomi Daerah (Penelitian Stranas)	Ketua	DPPM	2009
	6.	Membangun Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Siswa Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia	Anggota	DPPM	2009

		(Penelitian Hibah Kompetitif Nasional)			
	7.	Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (tahap 1).	Ketua	DIPA UNY	2010
	8.	Tipologi Perubahan dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren <i>Salaf</i> .	Ketua	DPPM	2010
10.	Publikasi Ilmiah				
	<b>No.</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Jurnal</b>		<b>Tahun</b>
	1.	Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam	<i>INFORMASI: Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial</i> , No. 01 Th. XXXII 2006, ISSN: 0126-1650		2006
	2.	Penanganan Kasus-kasus Moral di Indonesia Perspektif Islam	<i>SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial</i> , Volume III No. 1 Mei 2006, ISSN:1829-5759		2006
	3.	Bathok Bolu dan Tradisi Masyarakat Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta Perspektif Agama dan Budaya	<i>Humaniora</i> , Vol. 12 No. 1, April 2007, ISSN:1412-4009		2007
	4.	Meneladani Nabi Muhammad Saw. dalam Kehidupan Sehari-hari	<i>HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum</i> , Vol. 8 No. 1, Maret 2008, ISSN:1412-1271		2008
	5.	Pembinaan Akhlak Mulia dalam Berhubungan antar Sesama Manusia dalam Perspektif Islam	<i>HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum</i> , Vol. 9 No. 1, Maret 2009, ISSN:1412-1271		2009
	6.	Artikel: "Pembentukan Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Mahasiswa UNY Melalui Pembelajaran PAI."	Dimuat dalam <i>Jurnal Cakrawala Pendidikan</i> , No. 1, Februari 2010, Tahun XXIX. ISSN: 0216-1370		2010
	7.	Artikel: "Pembelajaran Hukum Islam Berbasis Pembelajaran Moral di Jurusan PKN Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta."	Dimuat dalam <i>Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah</i> , diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Edisi Khusus, Vol. 44 (2010) ISSN: 0854-8722.		2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.

Yogyakarta, 28 Oktober 2014  
Pengusul,

Dr. Marzuki, M.Ag.  
NIP. 19660421 199203 1 001